

EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL KAS (STUDI PADA PERKUMPULAN DHARMAPUTRI)

Peronica Elyana
peronicae@gmail.com

R. A. Supriyono
supriyonora@gmail.com

INTISARI

Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai sistem pengendalian internal kas Perkumpulan Dharmaputri dibandingkan dengan unsur-unsur pengendalian internal COSO, menilai penyebab sistem pengendalian internal kas Perkumpulan Dharmaputri yang diduga belum memadai jika dibandingkan dengan unsur-unsur pengendalian internal COSO.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dengan menggunakan *Internal Control Questionnaire (ICQ)* dan Keputusan Kapitel SPM, wawancara mendalam berdasarkan tujuh belas prinsip pengendalian internal COSO, observasi langsung, dan analisis dokumentasi. Setelah data terkumpul, dilakukan analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian, dan simpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal kas Perkumpulan Dharmaputri secara keseluruhan cukup memadai. Namun masih ada dua prinsip yang kurang memadai, yaitu prinsip penilaian risiko *fraud* dan prinsip memperoleh dan menghasilkan informasi yang relevan. Dua prinsip yang kurang memadai tersebut disebabkan oleh belum adanya analisis risiko *fraud*, belum tersedianya informasi keuangan yang akurat, dan masih ada kebijakan yang belum dibakukan. Saran yang diberikan adalah membangun sistem pengendalian internal kas PDP yang holistik, membakukan *Flowchart* penerimaan dan pengeluaran kas, dan membakukan kebijakan keuangan untuk meningkatkan sistem pengendalian internal kas PDP.

Kata kunci: sistem pengendalian internal, COSO, kas.

I. PENDAHULUAN

Organisasi dipandang sebagai suatu struktur kerja sama dan suatu proses kerja sama, serta sebagai suatu sistem. Dengan pendekatan sistem, organisasi dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang di dalamnya ada unsur-unsur yang saling berinteraksi dan berpengaruh, dan semuanya bergerak ke arah tujuan yang ditentukan (Muhyadi 1989, 12-14).

Setiap organisasi mempunyai tujuan yang khas. Tujuan ini ditunjukkan dalam sasaran yang diharapkan dapat tercapai. Agar dapat mencapai sasaran yang diharapkan, semua organisasi menyusun struktur agar anggotanya dapat melakukan pekerjaannya (Robbins & Coulter 2010, 18). Salah satu sarana untuk mencapai tujuan bersama dalam organisasi adalah dengan menciptakan sistem pengendalian internal yang memadai melalui kegiatan yang efektif dan efisien.

Pengendalian internal merupakan suatu proses dan prosedur yang dijalankan untuk menyediakan jaminan yang memadai bahwa tujuan pengendalian dapat dipenuhi. Dikatakan suatu proses karena menyebar ke seluruh aktivitas pengoperasian organisasi dan merupakan bagian integral dari aktivitas manajemen Romney and Steinbart (2015: 226). *Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission* (COSO 2013) mendefinisikan pengendalian internal sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan semua lapisan entitas, yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk mencapai tiga tujuan entitas, yaitu efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Ketiga tujuan pengendalian internal tersebut merupakan hasil dari suatu sistem pengendalian internal yang baik, yang dapat dicapai dengan memperhatikan lima unsur sistem pengendalian internal yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, pengawasan/*moni-*

itoring. Unsur-unsur pengendalian internal tersebut efisien dan efektif apabila kelima unsur tersebut berfungsi dengan baik, beroperasi bersama, dan terintegrasi (Supriyono 2016, 156-160).

Tuntutan terbangunnya unsur-unsur sistem pengendalian internal yang andal merupakan kebutuhan yang penting dan mendasar bagi organisasi nirlaba. Hal ini merupakan pusat simpul ikatan kepercayaan para penyumbang kepada organisasi nirlaba dan kepercayaan para penyumbang sebagai dukungan pendanaan sumber daya utama bagi organisasi nirlaba dalam mencapai tujuan. Perlu disadari bahwa membangun kelima unsur pengendalian internal tersebut bukanlah perkara yang mudah. Menurut Eko Komara K. (2014: 20-23), sistem pengendalian internal organisasi nirlaba yang seharusnya menjadi salah satu kunci pengaman keberlanjutan gerak organisasi, pada kenyataannya jarang dikembangkan dalam keutuhan proses yang cukup memadai. Penerapan unsur pengendalian internal tersebut tidak berfungsi dengan baik disebabkan oleh adanya unsur kepercayaan pada orang-orang yang diberi tanggung jawab mengelola dana tersebut. Unsur-unsur pengendalian internal khususnya fungsi pengawasan tidak berjalan dengan baik sehingga keamanan terhadap aset organisasi menjadi lemah. Hal ini dapat menghambat organisasi dalam mencapai tujuannya.

Pengamanan aset menjadi hal penting bagi setiap organisasi karena aset mencerminkan kekayaan organisasi yang menentukan kelangsungan hidup organisasi. Aset merupakan sumber daya yang dapat segera dikonversi menjadi kas selama siklus operasi organisasi. Oleh karena itu, perlu dibentuk suatu sistem pengendalian internal untuk melindungi aset dari hal-hal yang bisa mengancam keberadaan aset tersebut, terutama aset yang paling rentan disalahgunakan. Salah satu aset yang paling rentan ialah kas karena kas merupakan aset yang paling *likuid*.

Setiap organisasi membutuhkan kas untuk membiayai aktivitasnya operasional

dan aktivitas *non-operasional*. Kas memegang peran penting dalam organisasi karena kas menjadi sarana bagi organisasi dalam mencapai tujuan operasionalnya. Namun, karena sifatnya yang sangat *liquid*, kas sering menjadi sasaran kecurangan atau pencurian. Oleh karena itu, sangat penting bagi organisasi membangun prosedur pengendalian internal untuk melindungi kas dari pencurian dan penyalahgunaan (Haryono 2005, 3-4).

Evaluasi pengendalian internal kas menjadi hal yang sangat menarik untuk diteliti karena penulis dapat menilai bagaimana implementasi pengendalian internal kas untuk meminimalisasi kerugian dan risiko yang terjadi di suatu organisasi. Penelitian ini menggunakan kerangka kerja COSO untuk mengevaluasi pengendalian internal kas, karena COSO telah menjadi standar di seluruh dunia untuk membangun dan mengukur pengendalian internal. Sebagai objek penelitian, penulis memilih salah satu yayasan pendidikan yang berada di Surabaya, yaitu Perkumpulan Dharmaputri (PDp). Karena perkumpulan tersebut mengelola karya pendidikan yang cukup banyak dan tersebar di Indonesia, serta keunikan model pelayanan organisasi *non-profit* yang dikelola oleh Para Suster Santa Perawan Maria (SPM).

Dalam menyelenggarakan kegiatannya, PDp membutuhkan dana yang cukup besar. Penyelenggaraan pendidikan tersebut, tidak bisa lepas dari transaksi kas, baik penerimaan maupun pengeluaran. Kas menjadi hal yang penting bagi seluruh aktivitas operasional unit karya PDp karena kas menjadi sarana dalam mencapai tujuan pelayanan. Oleh karena itu, PDp membutuhkan sistem pengendalian internal kas yang tepat supaya dapat memantau seluruh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan, visi, misi, dan rencana strategis.

Sebagai langkah konkret dalam mencapai tujuannya, PDp terus mengusahakan peningkatan proses transparansi, menciptakan mekanisme dan sistem pengendalian yang dapat diandalkan keamanannya (Keputusan Kapitel Umum SPM 2010, 15).

Hanya saja unsur-unsur sistem pengendalian yang diupayakan oleh PDp diduga belum sepenuhnya berfungsi dengan baik, terutama sistem pengendalian internal kas.

Berdasarkan hasil pengecekan keuangan Bendahara PDP pada unit sekolah ditemukan adanya selisih kas yang signifikan. Hal tersebut mengakibatkan operasional pendidikan menjadi terganggu, kegiatan sekolah tidak berjalan dengan efisien dan efektif. Selain itu, pelaporan keuangan unit sekolah juga belum sesuai dengan Pedoman Keuangan PDp. Dari informasi tersebut, diduga tiga tujuan sistem pengendalian internal kas PDp belum terpenuhi.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis ingin menilai pelaksanaan pengendalian internal kas pada PDp dibandingkan dengan unsur-unsur pengendalian internal menurut COSO. Melalui sistem pengendalian internal kas yang tepat, diharapkan dapat mendukung tercapainya tujuan pendidikan karya PDp. Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian sistem pengendalian internal kas pada PDp.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Pada tahun 1958 Institusi Akuntan Publik Amerika (AICPA) menjelaskan definisi dan ruang lingkup pengendalian internal yang diatur dalam standar *auditing* pengendalian internal dalam arti luas, termasuk kendali yang dapat dibedakan dari dua sisi, yaitu pengendalian akuntansi berkaitan dengan pengamanan aset, dan pengendalian administratif yang terkait dengan catatan keuangan. Definisi tersebut masih belum memadai untuk pengendalian internal, maka pada tahun 1972 AICPA mengeluarkan interpretasi mengenai pengamanan aset terhadap kemungkinan kerugian yang timbul dari kesalahan yang tidak disengaja/disengaja dalam transaksi pengolahan dan penanganan aset, dan keandalan catatan keuangan yang ditujukan untuk pelaporan eksternal (Supriyono 2016, 147-149).

COSO menerbitkan *Internal Control Integrated Framework (ICIF)* tahun 2013 sebagai revisi dari COSO versi 1992 (Supriyono 2016, 147-156). COSO mendefinisikan pengendalian internal sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan semua lapisan entitas, yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk mencapai tiga tujuan entitas.

Tujuan Sistem Pengendalian Internal

Berdasarkan COSO 2013, pengendalian internal memiliki, yaitu efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Menurut Supriyono (2016: 158-160), ketiga tujuan pengendalian internal tersebut merupakan hasil dari suatu sistem pengendalian internal yang baik, yang dapat dicapai dengan memperhatikan unsur-unsur pengendalian internal.

Unsur-Unsur Pengendalian Internal

Unsur-unsur pengendalian internal menurut COSO 2013 dalam Supriyono (2016, 161-165) adalah sebagai berikut.

1. Lingkungan pengendalian menjadi dasar dari keempat unsur pengendalian lainnya yang mencerminkan sikap dan tindakan dari dewan komisaris, direksi, manajemen, dan pegawai secara keseluruhan.
2. Penilaian risiko merupakan proses dinamis dan interaktif dalam mengidentifikasi dan menilai risiko-risiko yang akan dihadapi oleh suatu entitas dalam mencapai tujuan.
3. Aktivitas pengendalian meliputi kebijakan dan prosedur pengendalian yang ditetapkan dan dilaksanakan untuk memastikan dan memberi keyakinan bahwa tindakan yang dipilih manajemen dalam menghadapi risiko dilaksanakan dengan efektif.
4. Informasi dan komunikasi merupakan unsur yang menjangkau ke semua lapisan unsur-unsur yang lain. Sistem informasi yang andal, relevan, dan tepat

waktu dibutuhkan untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi.

5. Pemantauan (*monitoring*) dilakukan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa pengendalian internal dilakukan dengan efektif. Dari hasil *monitoring* ini, ditemukan kelemahan pengendalian sehingga dapat direkomendasikan pengendalian yang lebih baik.

Kas

Pengendalian internal kas sangat dibutuhkan oleh suatu organisasi. Dalam hal ini dibutuhkan kesadaran, kemauan, dan komitmen seluruh unsur organisasi untuk bekerja bersama mencapai tujuan. Menurut Rusdi (2004: 175-176), sebagai upaya organisasi dalam melindungi kas dari pencurian dan penyalahgunaan, organisasi harus mengendalikan kas sejak saat diterima sampai dengan disetorkan ke bank.

Semakin besar dan kompleks suatu perusahaan, maka peranan pembukuan dan akuntansi semakin penting juga untuk mengawasi penerimaan kas, mencegah pengeluaran kas yang tidak sah, dan mencegah kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi (Sugiharto 1987, 4).

Kebijakan Keuangan Kongregasi SPM

Kebijakan keuangan Kongregasi SPM berlandaskan pada hasil keputusan Kapitel Kongregasi SPM. Tujuan kapitel tersebut adalah untuk mengevaluasi dan membuat kebijakan serta perencanaan kegiatan di berbagai bidang karya Kongregasi SPM untuk 6 tahun.

Kebijakan keuangan menurut Kapitel Umum SPM (2016: 15-18), yaitu (1) prioritas penggunaan harta benda dan uang dengan cara bertanggung jawab, akuntabel, dan transparan; (2) meningkatkan proses transparansi dan menciptakan mekanisme serta sistem *control*; (3) mengalokasikan dana untuk meningkatkan kualitas hidup dan kelangsungan karya perutusan.

Evaluasi

Arikunto (2010: 1) mengatakan bahwa evaluasi merupakan sebuah proses untuk menentukan hasil yang telah dicapai

dari beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Evaluasi merupakan suatu proses mengumpulkan informasi, mengukur, menilai kegiatan dan membandingkan dengan kriteria, standar dan kebijakan, untuk mendukung tercapainya tujuan. Evaluasi merupakan sarana untuk menilai perencanaan, pelaksanaan dan *monitoring* kegiatan sesuai dengan standar dan kebijakan guna mencapai hasil yang lebih memadai.

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan Fauzia Kartika Sari (2013) dengan judul “Evaluasi Penerapan Pengendalian Intern Terhadap Penerimaan Kas Pada Rumah Sakit Umum Daerah Abepura.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pengendalian intern yang ada telah berjalan memadai (cukup), namun masih ada kecurangan yang dilakukan para karyawan untuk mencuri kas. Hasil ini menunjukkan bahwa pihak rumah sakit seharusnya lebih baik lagi memantau segala aktivitas yang ada.

Hasil penelitian yang dilakukan Raja Ae Fitrasari M (2013), tentang “Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Badan Usaha Milik Daerah (studi Kasus pada PT Permodalan Provinsi Riau).” SPIP yang ada pada PT PER sangat memadai, fungsi dan operasi SPIP pada PT PER telah berjalan dengan sangat efektif meskipun masih ditemukan beberapa kelemahan, tetapi perusahaan telah melakukan usaha-usaha perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan dalam kegiatan operasional.

III. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan menggunakan studi kasus tunggal untuk menjelaskan suatu masalah/kejadian nyata yang terjadi terkait sistem pengendalian internal kas pada PDp, dan mencari pemecahan terhadap masalah tersebut dengan menggunakan metode pengumpulan data yang beragam. Teknik pemilihan sampel menggunakan *snowball sampling*. Partisipan dalam penelitian ini adalah pengurus PDp dan staf, serta orang-

orang yang dianggap memiliki pemahaman yang baik terkait sistem pengendalian internal kas pada PDp. Selanjutnya peneliti akan mewawancarai partisipan sesuai dengan yang dibutuhkan.

Sumber data dalam penelitian ini berasal data primer dan data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang berasal dari hasil kuesioner, hasil wawancara dengan partisipan, dan hasil observasi pada PDp dan SMA Stella Maris Surabaya. Data sekunder dalam penelitian ini berkaitan dengan topik sistem pengendalian internal kas PDp. Data sekunder tersebut dari dokumentasi PDp, antara lain struktur organisasi, visi, misi, tujuan organisasi, peraturan terkait pengelolaan keuangan PDp, laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, jurnal, buku besar, dan bukti penerimaan dan pengeluaran kas.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pengumpulan data kuesioner dalam penelitian ini menggunakan *Internal Control Questionnaire (ICQ)* yang disesuaikan dalam konteks SPI kas, dan pertanyaan kuesioner yang diolah dari Keputusan Kapitel SPM. Kuesioner dalam penelitian ini ditujukan kepada empat staf keuangan kantor PDp dan satu staf keuangan SMA Stella Maris. Berdasarkan jawaban yang diperoleh dari partisipan, dilakukan perhitungan kuesioner dengan menggunakan rumus Champion. Wawancara mendalam dalam penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lengkap terkait sistem pengendalian internal kas PDp. Wawancara akan dilakukan kepada empat pengurus dan satu staf keuangan PDp, bendahara Kongregasi SPM, bendahara SMA Stella Maris Surabaya, serta pihak yang terkait dengan pengelolaan sistem pengendalian internal kas PDp. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi secara langsung pada kantor pusat PDp Surabaya dan Ekonomat SPM. Tindak lanjut dari teknik pengumpulan ialah menganalisis data. Teknik analisis

data berdasarkan Miles and Hubberman (1992: 16), yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik simpulan/verifikasi. Uji keabsahan dalam penelitian ini menggunakan *membercheck*, triangulasi sumber, dan triangulasi teknik.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Lingkungan Pengendalian

COSO membagi unsur lingkungan pengendalian menjadi lima prinsip, yaitu (1) integritas dan nilai-nilai etika, (2) pelaksanaan tanggung jawab pengawasan, (3) struktur, wewenang, dan tanggung jawab, (4) komitmen terhadap kompetensi, (5) akuntabilitas atas sistem pengendalian internal.

1. Integritas dan Nilai-Nilai Etika

Pelaksanaan integritas dan nilai etika PDp, dengan skor 66,67%. Berdasarkan klasifikasi Champion skor tersebut termasuk kategori memadai. PDp mempunyai komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika. Hal tersebut sudah ditetapkan dan di alirkan ke seluruh unit pendidikan. Namun, secara resmi tujuan, visi, misi dan program tahunan PDp tidak dikomunikasikan kepada seluruh staf PDp.

2. Pelaksanakan Tanggung Jawab Pengawasan

Pelaksanaan tanggung jawab pengawasan oleh bendahara PDp terkait sistem pengendalian internal kas cukup memadai dengan skor 75%. Bendahara menetapkan tanggung jawab tiap-tiap staf keuangan, dan melaksanakan tugas pengawasan terhadap staf keuangan kantor dan pengawasan keuangan terhadap seluruh satuan pendidikan secara periodik. Dalam menjalankan tugas pengawasan, bendahara belum melibatkan auditor eksternal.

3. Struktur, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pelaksanaan wewenang, dan tanggung jawab dalam kategori sangat memadai dengan skor 77,14%. Struktur, wewenang, dan tanggung jawab terkait sistem

pengendalian internal kas secara keseluruhan telah dicantumkan dengan jelas oleh PDp dalam buku Pokok-Pokok Kepegawaian Kantor PDp. Namun, ada bagian fungsi-fungsi tertentu yang harus direviu kembali relevansinya, seperti bagian Litbang. Pelaksanaan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab pada satuan pendidikan telah terlaksana dengan memadai, dan ada Surat Keputusan secara berkala dari PDp terkait hal tersebut.

4. Komitmen terhadap Kompetensi

Komitmen PDp terhadap kompetensi calon pegawai dan pegawai tetap sangat memadai dengan skor 90,91%. PDp mempunyai standar yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan satuan pendidikan serta komitmen terhadap peningkatan kualitas SDM dalam pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tujuan PDp. Komitmen terhadap kompetensi tersebut berupa tunjangan profesi guru, pembinaan dan pelatihan baik dari tenaga ahli akademik maupun praktisi, serta studi formal.

5. Akuntabilitas atas Sistem Pengendalian Internal

Pelaksanaan akuntabilitas atas sistem pengendalian internal pada PDp dengan skor 57,50%, dalam kategori cukup memadai. Hal ini tampak dalam kepercayaan yang diberikan pengurus kepada tiap-tiap staf kantor dan satuan pendidikan untuk mengembangkan tanggung jawab sesuai dengan wewenang dan fungsinya. Namun, ada beberapa yang belum terlaksana dengan baik, terutama yang berkaitan dengan penghargaan secara khusus bagi karyawan yang kinerjanya baik.

B. Penilaian Risiko

COSO membagi unsur penilaian risiko menjadi 4 prinsip, yaitu (1) penetapan tujuan, (2) identifikasi dan analisis risiko, (3) penilaian risiko *fraud*, dan (4) identifikasi dan analisis perubahan signifikan.

1. Penetapan Tujuan

Penetapan tujuan PDp dalam kategori sangat memadai. Hal ini ditunjukkan dengan hasil skor kuesioner sebesar 85,45%.

Prosedur pengamanan aset seperti uang tunai sudah dilaksanakan dengan baik. Meskipun belum ada kebijakan tertulis terkait pengamanan aset, namun dalam pelaksanaannya sudah dilakukan cara untuk mengurangi kemungkinan risiko pada penerimaan kas, yaitu dengan menerapkan pembayaran melalui bank. PDp mengusahakan taat pada ketentuan hukum dan perundangan perpajakan, serta pedoman pengelolaan keuangan internal. Namun, PDp belum pernah membuat laporan efektivitas atas pengendalian internal karena sistem pengendalian internal belum disusun secara holistik.

2. Identifikasi dan Analisis Risiko

Berdasarkan hasil temuan terkait identifikasi dan analisis risiko, PDp cukup memadai dengan skor 64%. Pelaksanaan identifikasi dan analisis risiko dilakukan dalam bentuk pengecekan laporan keuangan di satuan pendidikan. Hasil pengecekan keuangan tersebut digunakan untuk perbaikan dan mengurangi risiko selisih kas. PDp sebagai organisasi secara khusus belum menetapkan suatu struktur pengendalian risiko kas. Pelaksanaan penilaian risiko di organisasi belum sampai pada tahap identifikasi dan analisis risiko karena masih sebatas tertib administrasi.

3. Penilaian Risiko *Fraud*

Hasil kuesioner berkaitan dengan risiko *fraud* pada PDp kurang memadai. Hal ini terbukti dengan skor 46,67%, karena sebagian besar partisipan menjawab. Penilaian risiko dan usaha pengamanan dilakukan setelah terjadi *fraud*. Pengecekan keuangan satuan pendidikan dilakukan secara berkala. Dari hasil pengecekan keuangan tersebut, selalu ditemukan selisih kas kurang. Kemungkinan di akun tersebut terjadi *fraud*. Melalui pengalaman ini, diambil kebijakan untuk penerimaan kas dari siswa melalui bank untuk mengurangi risiko terjadinya *fraud*.

4. Identifikasi dan Analisis Perubahan Signifikan

Skor kuesioner berkaitan dengan identifikasi dan analisis perubahan signi-

fikan sebesar 67,27% dalam kategori cukup memadai. Organisasi sudah memiliki mekanisme untuk bereaksi terhadap risiko yang diakibatkan oleh perubahan ekonomi yang dapat memengaruhi tercapainya tujuan ekonomi. PDp berusaha menciptakan sistem pengendalian internal untuk mengantisipasi risiko terhadap perubahan peraturan, perubahan ekonomi, serta model pelayanan dengan sistem teknologi baru. Model pelayanan tersebut, antara lain melalui program keuangan SIKAS dan kebijakan penerimaan kas melalui bank.

C. Aktivitas Pengendalian

COSO membagi unsur aktivitas pengendalian menjadi 3 prinsip, yaitu (1) mengembangkan kegiatan pengendalian, (2) mengembangkan pengendalian atas teknologi, dan (3) merinci ke dalam kebijakan dan prosedur.

1. Mengembangkan Kegiatan Pengendalian

Hasil kuesioner prinsip mengembangkan kegiatan pengendalian dengan skor 84% termasuk dalam kategori sangat memadai. Kebijakan pengamanan fisik telah ditetapkan; uang tunai telah diamankan dalam brankas; dihitung secara periodik, dan dibandingkan dengan catatan pengendalian. Program pengecekan keuangan tersebut dilaksanakan secara periodik dengan tujuan untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya risiko sehingga bisa diambil langkah pengamanan lebih dini.

2. Mengembangkan Pengendalian Atas Teknologi

Prinsip mengembangkan pengendalian umum atas teknologi sebesar 84%, dengan kategori sangat memadai. PDp sudah menggunakan teknologi pada proses pelayanannya terkait sistem pengendalian internal kas. Pengendalian atas pengamanan sistem informasi telah dilaksanakan secara memadai. Salah satu teknologi tersebut adalah program keuangan SIKAS untuk kantor dan satuan pendidikan. Aplikasi SIKAS banyak memberikan dukungan dalam pengendalian kas PDp. Melalui

aplikasi tersebut, bendahara PDp lebih cepat mendapatkan informasi kondisi keuangan di satuan pendidikan. SIKAS dilengkapi dengan sistem pengaman berupa *password*, dan program tersebut hanya bisa diakses oleh pengguna yang memiliki otorisasi dari PDp. Selain itu, sebagai upaya pengendalian atas pengamanan sistem informasi, PDp mempunyai pegawai khusus IT.

3. Merinci ke dalam Kebijakan dan Prosedur

Skor persentase terkait merinci ke dalam kebijakan dan prosedur Perkumpulan Dharmaputri sebesar 81,25% dalam kategori sangat memadai. Organisasi sudah mengambil langkah-langkah pencegahan dan meminimalisasi potensi kerusakan dan terhentinya operasi komputer antara lain dengan *back up* data dan program, *back up* data di tempat lain, dan pemberian antivirus di seluruh komputer kantor dan unit PDp.

D. Informasi dan Komunikasi

COSO membagi unsur informasi dan komunikasi menjadi 3 prinsip, yaitu (1) memperoleh dan menghasilkan informasi yang relevan, (2) komunikasi internal, dan (3) komunikasi eksternal.

1. Memperoleh dan Menghasilkan Informasi yang Relevan

Organisasi cukup memadai dalam menyediakan informasi yang relevan untuk mendukung fungsi pengendalian internal kas. Program keuangan SIKAS yang ada memberikan banyak informasi keuangan yang relevan bagi *user* jika program tersebut difungsikan dengan maksimal. Namun, secara keseluruhan PDp dan satuan pendidikan belum menggunakan program keuangan tersebut dengan baik. Masih banyak satuan pendidikan yang mengirim laporan keuangan secara manual, sehingga laporan keuangan tersebut harus diolah lagi oleh staf PDp. Akibatnya, secara keseluruhan laporan keuangan PDp tidak bisa memberikan informasi yang relevan, akurat dan tepat

waktu. Hal ini tampak dalam skor persentase sebesar 48,57%, dengan kategori kurang memadai.

2. Komunikasi Internal

Komunikasi internal PDp ditujukan ke beberapa pihak, yaitu komunikasi antarpengurus PDp, komunikasi dengan staf kantor PDP, komunikasi dengan bendahara di satuan unit pendidikan. Pengurus PDp mengkomunikasikan tanggung jawab setiap pegawai sesuai dengan fungsi dan wewenangnya. Komunikasi tersebut diciptakan untuk meningkatkan pengendalian internal di seluruh satuan pendidikan PDp. Secara keseluruhan komunikasi internal pada PDp cukup memadai, dengan skor persentase sebesar 61,82%. Beberapa hal perlu ditingkatkan agar komunikasi internal dapat semakin meningkatkan pengendalian internal kas PDp.

3. Komunikasi Eksternal

Komunikasi dengan pihak eksternal terkait pengelolaan keuangan melalui wadah Jarkomet, Yadapen, konsultan pajak, BPJS, dan lain-lain. Komunikasi eksternal tersebut diinformasikan kepada pihak internal/antarpengurus PDp, dan Kongregasi SPM sebagai pemilik. Bentuk komunikasi eksternal unit sekolah antara lain komunikasi dengan pihak Dinas Pendidikan, MPK yang diadakan rutin setiap triwulan, masyarakat sekitar, wali murid, melalui *open house*, lomba-lomba antarsekolah, dan lain-lain. Skor persentase 72%, secara keseluruhan komunikasi eksternal PDp cukup memadai dalam mendukung organisasi dalam mencapai tujuannya.

E. Pengawasan

COSO membagi unsur pengawasan menjadi 2 prinsip yaitu (1) evaluasi berkelanjutan dan terpisah, (2) evaluasi dan laporan kelemahan pengendalian internal.

1. Evaluasi Berkelanjutan dan Terpisah

Evaluasi berkelanjutan dan terpisah dengan skor sebesar 70,91%. Berdasarkan klasifikasi Champion skor tersebut termasuk kategori memadai. Aktivitas pengawasan yang dilakukan PDp terkait de-

ngan observasi dilakukan secara periodik dan terprogram. Aktivitas evaluasi berkelanjutan dalam bidang keuangan dilakukan oleh PDp berkaitan dengan observasi secara periodik dan terprogram. Aktivitas tersebut meliputi pengecekan keuangan dengan disertai rekomendasi untuk perbaikan dan menjadi bahan pertimbangan untuk evaluasi periode selanjutnya. Namun, ada beberapa bentuk pengawasan yang belum memadai, antara lain penilaian pengendalian internal yang dilakukan oleh pimpinan berkaitan dengan fungsi lima unsur pengendalian internal di PDp.

2. Evaluasi dan Laporan Kelemahan Pengendalian Internal

Evaluasi dan laporan kelemahan pengendalian internal yang dilakukan oleh Perkumpulan Dharmaputri dalam bentuk pengecekan laporan keuangan pada seluruh satuan pendidikan. Hasil dari pengecekan tersebut, dalam bentuk laporan berita acara rekomendasi perbaikan. Rekomendasi perbaikan tersebut diinformasikan kepada Kongregasi SPM, dan selanjutnya bersama dengan pengurus PDp mengevaluasi dan mencari bentuk pengendalian internal kas yang lebih tepat dan efektif. Secara keseluruhan evaluasi dan laporan kelemahan pengendalian internal kas PDp sangat memadai dengan skor 90%, tetapi belum ada kebijakan dan prosedur yang tertulis terkait hasil evaluasi tersebut.

V. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Penelitian tentang evaluasi sistem pengendalian internal kas pada PDp dilakukan untuk menilai bagaimana sistem pengendalian internal kas PDp dibandingkan dengan unsur-unsur pengendalian internal COSO, dan apa saja yang menyebabkan sistem pengendalian internal kas PDp belum memadai. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diambil simpulan bahwa sistem pengendalian internal kas PDp secara keseluruhan cukup memadai. Namun masih ada dua prinsip yang kurang memadai, yaitu prinsip penilaian risiko

fraud dan prinsip memperoleh dan menghasilkan informasi yang relevan. Dua prinsip yang kurang memadai tersebut disebabkan oleh belum adanya analisis risiko *fraud*, belum tersedianya informasi keuangan yang akurat, dan masih ada kebijakan yang belum dibakukan. Kedua prinsip tersebut tidak signifikan menghambat pencapaian tujuan PDp, karena dukungan dari lima belas prinsip pengendalian internal yang cukup memadai, dan sangat memadai.

Keterbatasan Penelitian

Beberapa keterbatasan dalam penelitian evaluasi sistem pengendalian internal kas pada Perkumpulan Dharmaputri adalah sebagai berikut.

1. Penelitian ini dilakukan di kantor PDp dan satu unit pendidikan sehingga sangat dimungkinkan permasalahan sistem pengendalian internal kas belum teridentifikasi secara keseluruhan.
2. Peneliti tidak mendapatkan informasi kas kecil PDp dari staf pelaksana pemegang kas kecil.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi sistem pengendalian internal kas pada PDp, beberapa rekomendasi yang diusulkan untuk memperbaiki sistem pengendalian internal kas PDp adalah sebagai berikut.

1. Bagi Perkumpulan Dharmaputri
 - a. Membangun sistem pengendalian internal kas PDp yang holistik.
 - b. Merinci kebijakan dan prosedur sistem pengendalian internal kas PDp.
 - c. Meningkatkan komunikasi dengan pihak internal terutama staf kantor PDp berkaitan dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi.
 - d. Usulan *Flowchart* penerimaan dan pengeluaran kas PDp.
2. Bagi Kongregasi SPM
 - a. Membakukan beberapa kebijakan yang terkait dengan sistem pengendalian internal kas PDp.
 - b. Meningkatkan peran Ekonom SPM dalam membangun sistem pengendalian internal kas PDp.

Daftar Pustaka

- Akbar, Rusdi. 2004. *Akuntansi Pengantar*. Yogyakarta: Penerbit Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Pe-rusahaan YKPN.
- Arikunto, Suharsini. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rhineka Cipta.
- Champion, Dean J. 1990. *Basic Statistic for Sosial Research*. New York: Mac-Millan Publishing Company.
- Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission. 2013. *Internal Control Integrated Framework*. New York: COSO.
- Fitrasari, M., Raja Ae., 2013. *Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Badan Usaha Milik Daerah (studi Kasus pada Pt Permodalan Provinsi Riau)*. Yogyakarta: Tesis Magister Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Universitas Gadjah Mada.
- Kuncoro, Mudrajad. 2009. *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*. Edisi 3. Yogyakarta: Penerbit Erlangga.
- Kurniawan, Eko Komara. 2014. *Karakteristik Tata Kelola Keuangan Nir-laba. Akuntabilitas Jurnal Akuntabilitas Organisasi Masyarakat Sipil*. Edisi 2 Februari – Juni 2014. Konsil LSM Indonesia.
- Miles, M.B dan A. M. Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Penerjemah Tjejep Rohendi Rohadi. Jakarta: Penerbit UI. Press.
- Muhyadi. 1989. *Organisasi. Teori, Struktur dan Proses*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Jakarta: Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan.
- Perkumpulan Dharmaputri. 2013. *Pokok-Pokok Kepegawaian PDp*. Surabaya: Penerbit PDp.
- Para Suster SPM. 2005. *Peraturan Hubungan Finansial–Ekonomi Antara Kongregasi SPM dan Perkumpulan Dharmaputri. Kongregasi Suster SPM*. Probolinggo: Sekretariat SPM Provindo.
- _____. 2010. *Keputusan Kapitel Umum 2010 Kongregasi Para Suster SPM*. Amersfoort: Kongregasi SPM.
- _____. 2016. *Keputusan Kapitel Umum 2016 Kongregasi Para Suster SPM Amersfoort*. Denekamp.
- _____. 2016. *Keputusan Kapitel SPM Provindo 2016. Kongregasi Para Suster SPM Amersfoort*. Probolinggo: Sekretariat SPM..
- Robbins, Stephen, P. dan Mary Coulter. 2010. *Manajemen*. Edisi Kedelapan Jilid 1. Jakarta: Penerbit Erlangga. Alih Bahasa Bob Sabran dan Devri Barnadi Putera.
- Romney dan Steinbart. 2015. *Accounting Information Systems*. 13th edition. Diterjemahkan oleh Kikin, Novita. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Sari, Fauzia Kartika. 2013. *Evaluasi Penerapan Pengendalian Intern Terhadap Penerimaan Kas Pada Rumah Sakit Umum Daerah Abepura*. Jurnal EM-BA. Vol.1 No.4 (Desember): 657-666. Diakses pada September 2017.
- Sugiharto. 1987. *Dasar-Dasar Akuntansi*. Jilid 2. Yogyakarta: Penerbit BPFE.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit CV. Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuabtitatif, Dan R & K*. Bandung: Penerbit CV. Alfabeta.
- Supriyono, R.A. 2016. *Akuntansi Keperilakuan*. Yogyakarta: Penerbit Gadjah Mada University Press.
- Jusuf, Al., Haryono. 2005. *Dasar-Dasar Akuntansi*. Edisi 6 Jilid 2. Yogyakarta: Penerbit Sekolah TIE YKPN.